



PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

SURAT EDARAN

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN
INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH TERINTEGRASI
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

I. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 berdasarkan kepada:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025;
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 917);
3. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6.2/13/Ro.Org tentang Instrumen, Mekanisme dan Tahapan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

II. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional telah mengalami perubahan paradigma secara signifikan. Perubahan paradigma pelaksanaan reformasi birokrasi ini diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Perubahan paradigma tersebut, terlihat dari berubahnya fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dari yang sebelumnya berfokus pada mewujudkan sasaran reformasi birokrasi melalui 8 area perubahan yaitu; 1) manajemen perubahan, 2) deregulasi kebijakan, 3) penataan organisasi/kelembagaan, 4) penataan tatalaksana, 5) penataan sistem manajemen SDM; 6) penguatan akuntabilitas kinerja, 7) penguatan pengawasan, dan 8) peningkatan kualitas pelayanan publik. Menjadi berfokus pada penyelesaian isu-isu strategis hulu dan hilir. Penyelesaian isu strategis hulu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB General. Sedangkan untuk menyelesaikan isu strategis hilir bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, stunting, inflasi, peningkatan investasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan melalui pendekatan pelaksanaan RB Tematik.

Perubahan kebijakan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2026. Peraturan Gubernur ini, merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Guna memastikan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan secara efektif dan efisien, pada Peraturan Gubernur tersebut, diamanatkan untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Maka, untuk melaksanakan amanat tersebut, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dalam bentuk Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

III. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah dalam melakukan tahapan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
2. Tujuan penyusunan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran indeks reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

IV. Ruang Lingkup Pelaksanaan

Ruang lingkup pelaksanaan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

V. Indikator dan Bobot Penilaian

Indikator dan Bobot Penilaian Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi:

A. Komponen penilaian yang terdiri dari:

1. Komponen Pelaksanaan RB General dengan bobot nilai sebesar 65 poin dengan indikator penilaian sebagai berikut:

INDIKATOR PENILAIAN				BOBOT	KETERANGAN
1				2	3
I.	PELAKSANAAN RB GENERAL			65,00	
	A.	Capaian Sasaran Strategis			
		1.	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	6,00	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektorial pada Perangkat Daerah
		2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6,00	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
		3.	Capaian IKU Perangkat Daerah	4,00	Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
		4.	Tindak Lanjut Rekomendasi (TLHP)	4,00	Persentase Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP
		5.	Laporan Realisasi Anggaran	4,00	Persentase Capaian Realisasi DPA-APBD tahun sebelumnya dan tahun berjalan
		6.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	4,00	Nilai Hasil Survey Internal ASN BerAKHLAK
		7.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	4,00	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		8.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	4,00	Tingkat Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

INDIKATOR PENILAIAN			BOBOT	KETERANGAN
1			2	3
	B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	24,00	
		1. Indeks Pelayanan Publik	4,00	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
		2. Indeks Reformasi Hukum	4,00	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah
		3. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	4,00	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N (LAPOR)
		4. Tingkat Digitalisasi Arsip	4,00	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah
		5. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	4,00	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE
		6. Indeks Profesionalitas ASN	4,00	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
	C.	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General	5,00	
		1. Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,00	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal
		2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General

2. Komponen Pelaksanaan RB Tematik dengan bobot nilai sebesar 35 poin dengan indikator penilaian sebagai berikut:

INDIKATOR PENILAIAN			BOBOT	KETERANGAN
1			2	3
II.	PELAKSANAAN RB TEMATIK		35,00	
	A.	Strategi Membangun RB Tematik	5,00	
		1. Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	2,00	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat logical framework
		2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	3,00	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik
	B.	Capaian Dampak RB Tematik	30,00	
		1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10,00	Tingkat Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN)
		2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	10,00	Penyampaian 1 buah "Praktek Baik" Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (Digital Services) dalam bentuk Media Publikasi seperti majalah elektronik, artikel, jurnal, dll yang dikemas secara informatif dan menarik maksimal 5 halaman
		3. Capaian Kinerja Core Business Organisasi	10,00	Penyampaian 1 Buah "Praktek Baik" Implementasi RB Tematik (Public Services) yang memberikan dampak kepada stakeholders Perangkat Daerah dalam bentuk Media Publikasi seperti majalah elektronik, artikel, jurnal, dll yang dikemas secara informatif dan menarik maksimal 5 halaman

INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	KETERANGAN
1	2	3
TOTAL NILAI RB PD	100,00	

B. Klasifikasi Penilaian

Nilai akhir hasil evaluasi dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun hasil penilaian tersebut dengan interval nilai 0 – 100 poin yang terbagi dalam 7 (tujuh) kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima serta memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat/stakeholders.
2.	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat/stakeholders.
3.	BB	>70-80	Baik	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima, namun belum memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat/stakeholders.
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas KKN dan pelayanan publik yang prima, namun belum mampu mendorong perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal telah diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh

No	Kategori	Nilai	Predikat	Interpretasi
				sebagian besar ASN di Perangkat Daerah.
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal hanya diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian kecil ASN di Perangkat Daerah.
7.	D	30-0	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

C. Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan

Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penghargaan Kepala Daerah dan bagi Perangkat Daerah yang mendapatkan penilaian terbaik diberikan penghargaan berupa Piala/Plakat Kepala Daerah atau bentuk penghargaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sanksi

Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diberikan Surat Teguran/Peringatan dari Kepala Daerah atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

1. Penilaian mandiri (self assesment), meliputi:

- Penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh asesor perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
- Penilaian mandiri dilakukan terhadap indikator penilaian yang telah dicapai disertai dengan bukti dukung yang menunjukkan pencapaian tersebut; dan
- Hasil penilaian mandiri disampaikan secara resmi oleh perangkat daerah kepada Tim Evaluasi.

2. Evaluasi Penilaian Mandiri, meliputi:

- a. Verifikasi hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang terdiri dari Perangkat Daerah sebagai leading institution/penanggung jawab indikator RB General, untuk memastikan data serta bukti dukung yang disampaikan asesor Perangkat Daerah telah sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan; dan
- b. Evaluasi penilaian akhir, dilaksanakan oleh Tim Penilai untuk menetapkan nilai akhir capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

VII. Pelaksanaan Pengukuran

1. Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh:

a. Asesor Perangkat Daerah yaitu;

- 1) Memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penilaian mandiri (*self assessment*) implementasi reformasi birokrasi pada perangkat daerah;
- 2) Asesor perangkat daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan minimal sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat administrasi yang merangkap sebagai Sekretaris Pelaksana RB General dan RB Tematik dan selebihnya dapat ditunjuk dari pejabat fungsional/pelaksana yang mewakili unit kerja pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
- 3) Asesor perangkat daerah melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan indikator/kriteria dengan senantiasa memperhatikan batas waktu penilaian sesuai dengan tahapan/ mekanisme yang telah ditentukan.

b. Tim Evaluasi terdiri dari:

- 1) Tim Penilai yang terdiri dari perangkat daerah sebagai leading institution/penanggungjawab indikator RB General dan RB Tematik, yang memiliki tugas melaksanakan verifikasi atas penilaian mandiri yang dilakukan oleh asesor perangkat daerah untuk memastikan data serta bukti dukung yang disampaikan asesor perangkat daerah telah sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Adapun penetapan personil Tim Evaluasi ditetapkan dengan Surat Tugas dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah Pengampu Indikator Pelaksanaan RB pada masing-masing perangkat daerah;

- 2) Tim evaluasi pengukuran indeks reformasi birokrasi perangkat daerah yang bertindak sebagai evaluator adalah sebagai berikut:

INDIKATOR PENILAIAN			EVALUATOR
1			2
I.	PELAKSANAAN RB GENERAL		
	A.	Capaian Sasaran Strategis	
		1. Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
		2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
		3. Capaian IKU Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		4. Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Inspektorat Daerah
		5. Laporan Realisasi Anggaran	BPKAD
		6. Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
		7. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
		8. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Inspektorat Daerah
	B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	
		1. Indeks Pelayanan Publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
		2. Indeks Reformasi Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah
		3. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
		4. Tingkat Digitalisasi Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		5. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		6. Indeks Profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian Daerah

INDIKATOR PENILAIAN 1			EVALUATOR 2
	C.	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General	
		1. Rencana Aksi Pembangunan RB General	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
		2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
II. PELAKSANAAN RB TEMATIK			
	A.	Strategi Membangun RB Tematik	
		1. Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	JF Biro Organisasi
		2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	JF Biro Organisasi
	B.	Capaian Dampak RB Tematik	
		1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
		3. Capaian Kinerja Core Business Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Kick Off Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah	Juli 2026	Entry Meeting Pengukuran Indeks RB Perangkat Daerah Provinsi

No	Tahapan Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	Pengumpulan data dukung penilaian mandiri Pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1 Agustus s.d 13 Desember 2026	Pengisian data dukung sesuai LKE penilaian mandiri Pelaksanaan RB Perangkat Daerah Provinsi oleh Asesor masing-masing Perangkat Daerah ke dalam Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Elektronik Berintegritas dan Mandiri (SURABE MANDIRI)
3	Verifikasi dan validasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Perangkat Daerah oleh Tim Penilai	September s.d 20 Desember 2026	Tim Penilai Pemerintah Daerah berperan dalam hal verifikasi dan validasi hasil penilaian mandiri pelaksanaan RB Perangkat Daerah
4	Pengumuman hasil sementara	21 Desember 2026	Pengumuman hasil sementara melalui Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Elektronik Berintegritas dan Mandiri (SURABE MANDIRI)
5	Masa sanggah terhadap hasil penilaian sementara	21 s.d 27 Desember 2026	Perbaikan data dukung oleh Asesor masing-masing Perangkat Daerah
6	Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	28 Desember 2026 s.d 4 Januari 2027	Dilaksanakan oleh Tim Penilai melalui Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Elektronik Berintegritas dan Mandiri (SURABE MANDIRI)
7	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	5 s.d 10 Januari 2027	LHE Pelaksanaan Indeks RB Perangkat Daerah.

No	Tahapan Pelaksanaan		Waktu Pelaksanaan	Keterangan
8	Pengumuman Evaluasi Penyampaian Penghargaan Daerah	Hasil serta Kepala	Februari/ Maret 2027	Sebagai upaya dalam memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja Terbaik dalam Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian permasalahan publik/stakeholders

B. PETUNJUK TEKNIS

1. Indikator Penilaian beserta Penjelasan Instrumen Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

INDIKATOR PENILAIAN					Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1					2	3	4	5	6	7	8
I.	RB GENERAL PD				100,00				100,00		
	A.	Capaian Sasaran Strategis			100,00				100,00		
		1.	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah		100,00	Nilai Kematangan Penerapan SPBE Perangkat Daerah			100,00		
		1.1	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses		50,00				50,00		
			a)	Telah Memiliki Dokumen Arsitektur SPBE Perangkat Daerah		A. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis, Layanan, Data dan Informasi, dan Aplikasi B. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis, Layanan dan Data dan Informasi C. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis dan Layanan D. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis	A/B/C/D	A	100,00	Template excel versi Kemenpanrb 1. Domain Proses Bisnis (sampai level n dan kelengkapan metadata) 2. Domain Layanan (selaras dengan Standar Pelayanan Minimal/SPM dan/atau Standar Pelayanan/SP) 3. Domain Aplikasi (selaras dengan Layanan dan data/informasi-nya) 4. Domain Data dan Informasi (selaras dengan Aplikasi layanan, Aplikasi Satu Data/Satu Peta, dan Sistem Penghubung Layanan/SPL ataupun API) 5. Domain Infrastruktur (optional/wajib bagi yang memiliki infrastruktur sendiri dan memanfaatkan Pusat Data Nasional) 6. Domain Keamanan Informasi (optional/wajib bagi yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi/ISO 27001)	2025 - 2026
			b)	Telah Memiliki Dokumen Peta Rencana (Roadmap) Penerapan SPBE Perangkat Daerah		Terdapat dokumen peta rencana (roadmap) SPBE	Ya/Tidak	Ya	100,00	Roadmap TIK yang dimiliki PD (Dokumen peta jalan TIK/Rencana Induk TIK/Masterplan Pengembangan TIK) dan Renstra PD	2025 - 2026

INDIKATOR PENILAIAN					Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1					2	3	4	5	6	7	8
				c)	Telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan SPBE setiap tahunnya	A. Tindak lanjut hasil evaluasi Anggaran SPBE dalam bentuk RKA/ DPA TA berikutnya B. Terdapat dokumentasi hasil reuiu dan evaluasi Anggaran SPBE C. Rencana dan Anggaran SPBE dikonsultasikan ke Diskominfo D. Terdapat Alokasi anggaran pelaksanaan SPBE setiap tahunnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran	A/B/C/D	A	100,00	Alokasi anggaran TIK diselaraskan antara roadmap dengan renstra	2025 - 2026
				d)	Telah melaksanakan Inovasi Peta Proses Bisnis	A. Tindak Lanjut Evaluasi Proses Bisnis diterapkan kembali ke Sistem Elektronik Versi Berikutnya B. Reviu dan Evaluasi Proses Bisnis yang sudah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik C. Terdapat Proses Bisnis yang sudah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik D. Sudah Memiliki Peta Proses Bisnis	A/B/C/D	A	100,00	Identifikasi inovasi berbasis TIK baru yang berbeda dengan proses bisnis sebelumnya	2025-2026
				e)	Telah menerapkan proses pembangunan Aplikasi SPBE sesuai siklus pembangunan aplikasi	A. Proses pembangunan/ pengembangan aplikasi telah direviu dan dievaluasi serta ditindaklanjuti B. Perangkat Daerah melakukan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi sesuai Rekomendasi Kementerian PAN RB C. Dokumentasi Proses Pembangunan/Pengembangan Aplikasi sesuai Siklus Pembangunan Aplikasi / SDLC secara lengkap. D. Perangkat Daerah konsultasi dengan Diskominfo dalam proses Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	A/B/C/D	A	100,00	Telah mengisi form pembangunan / pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2025-2026
				f)	Telah memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah	Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah	Ya/Tidak	Ya	100,00	Nota Dinas, Surat Permohonan, Surat Balasan, dan Berita Acara	2025-2026

INDIKATOR PENILAIAN					Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1					2	3	4	5	6	7	8
										Pemanfaatan Pusat Data Pemerintah Daerah	
				g)	Telah menggunakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Ya/Tidak	Ya	100,00	Surat permohonan assesment pada dinas kominfo, laporan instalasi jaringan	2025-2026
				h)	Telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Terdapat aktivitas penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Ya/Tidak	Ya	100,00	Surat Edaran, Surat Permohonan, Surat Balasan, dan Berita Acara Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2025-2026
				i)	Telah terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah	Terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah yang salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan Instansi Penganggunjawab SPBE terkait penerapan SPBE di Perangkat Daerah/Unit Kerja	Ya/Tidak	Ya	100,00	Surat Perintah Tim Pengelola TIK/SPBE/Tim Layanan Digital	2025-2026
				j)	Telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE	Terdapat Dokumen Manajemen Risiko SPBE	Ya/Tidak	Ya	100,00	Peta Risiko (Risk Register) yang mutakhir, Laporan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko,Kebijakan Manajemen Risiko TI, Kertas Kerja Profil Risiko	2026
				k)	Telah melakukan self-assessment Indeks KAMI	Terdapat dokumen atau laporan rekomendasi hasil verifikasi skor oleh BSSN	Ya/Tidak	Ya	100,00	1. Laporan Hasil Verifikasi Indeks KAMI 2. Laporan desk Indeks KAMI	2025-2026
				l)	Telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dokumen Elektronik	Laporan Rekapitulasi Pengguna Tanda Tangan Elektronik	Ya/Tidak	Ya	100,00	Laporan Rekapitulasi Pengguna Tanda Tangan Elektronik, laporan rekapitulasi Transaksi TTE	2025
				m)	Telah melaksanakan Manajemen Data	Terdapat Dokumen Manajemen Data (mencakup pengelolaan arsitektur data (bid. statistik), data induk, data referensi (tiap PD berbeda, mengacu ke pusat), basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data)	Ya/Tidak	Ya	100,00	Dokumen Manajemen Data PD (List user, log aktivitas, dataset PD)	2025-2026
				n)	Telah menerapkan Manajemen Aset TIK	Terdapat Dokumen/Laporan Manajemen Aset TIK	Ya/Tidak	Ya	100,00	Dokumen Manajemen Aset TIK PD	2025-2026
				o)	Telah dilakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK	Terdapat Dokumen/Laporan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia TIK	Ya/Tidak	Ya	100,00	laporan kegiatan pengembangan kompetensi SDM, baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun sertifikasi TIK	2025-2026

INDIKATOR PENILAIAN					Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1					2	3	4	5	6	7	8
			1.2	Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan	30,00				30,00		
				a) Telah Menggunakan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik		Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi perencanaan	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan SIPD (Perencanaan)	2025-2026
				b) Telah Menggunakan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik		Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi penganggaran	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan SIPD (Penganggaran)	2025-2026
				c) Telah Menggunakan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik		Telah menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIKD)	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan SIPD (Penatausahaan Keuangan Daerah)	2025-2026
				d) Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik		Telah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan SPSE	2025-2026
				e) Telah Menggunakan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik		Telah menggunakan SiAP Sulteng	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan SIAP Sulteng dan menu-menu layanan kepegawaian di dalam SiAP Sulteng (untuk PD lain)	2025-2026
				f) Telah Menggunakan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik		Telah menggunakan SRIKANDI	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan SRIKANDI	2025-2026
				g) Telah Menggunakan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik		Telah menggunakan aplikasi terkait aset (BMD)	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan Aplikasi Aset	2025-2026
				h) Telah Menggunakan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik		Telah menggunakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan Aplikasi SPIP	2025-2026
				i) Telah Menggunakan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik		Telah menggunakan e-SAKIP/Saliara	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan Aplikasi Sistem AKIP (Biro Organisasi dan Kemenpanrb)	2025-2026
				j) Telah Menggunakan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik		Telah menggunakan eKinerja/KMOB	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan eKinerja dan KMOB	2025-2026
				k) Telah Menggunakan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Telah menggunakan SP4N-LAPOR	Ya/Tidak	Ya	100,00	Rekap pengelolaan pengaduan	2025-2026
				l) Telah menggunakan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik		Telah menggunakan aplikasi Open Data	Ya/Tidak	Ya	100,00	Respon PD terkait Form Permintaan Data	2025-2026

INDIKATOR PENILAIAN					Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1					2	3	4	5	6	7	8
				m)	Telah Menggunakan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Elektronik	Telah menggunakan JDIH	Ya/Tidak	Ya	100,00	Screenshot Pemanfaatan JDIH (cek regulasi PD yang telah diterbitkan), Website/Sistem Informasi dari PD yang sudah diintegrasikan dengan JDIH khusus untuk produk hukumnya	2025-2026
				n)	Telah Memiliki Layanan Berbasis Elektronik	Telah memiliki layanan berbasis elektronik sesuai dengan core bisnis Perangkat Daerah	Ya/Tidak	Ya	100,00	Dokumentasi pengembangan layanan berbasis elektronik (sesuai siklus SDLC, manualbook, video penggunaan)	2025-2026
			1.3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral		20,00			20,00		
				a)	Telah Memiliki Standar Data Statistik	Telah memiliki standar data statistik yang lengkap untuk semua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu dinas Rumus: (Jumlah IKU yang memiliki standar data dibagi jumlah total IKU) * 100%	0-100	100	100,00	Dokumen standar data IKU Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan BPS no. 4 Tahun 2021 tentang SDSN	Data Tahun Sebelumnya
				b)	Persentase Data yang Memiliki Metadata	Tersedianya metadata terstandar (sesuai Perka BPS No. 5 Tahun 2020) untuk semua IKU Rumus: (Jumlah metadata IKU yang tersedia dibagi jumlah total IKU) * 100%	0-100	100	100,00	Dokumen metadata IKU Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan BPS no. 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik	Data Tahun Sebelumnya
				c)	Persentase Keterisian Data Prioritas (Relevansi)	Persentase keterisian data prioritas Rumus: (Jumlah data prioritas yang tersedia di Satu Data dibagi Potensi data prioritas) * 100%	0-100	100	100,00	List data prioritas dari masing-masing Perangkat Daerah (dari Bappeda)	Data Tahun Sebelumnya
				d)	Persentase Data yang Dirilis sesuai Jadwal (Aktualisasi & Ketepatan Waktu)	Persentase data prioritas yang terupdate sesuai waktu A = 100% terupdate B = 75% terupdate C = 50% terupdate D = 25% terupdate E = belum terupdate (0%)	A/B/C/D/E	A	100,00	Dokumen jumlah data prioritas yang telah terupdate (per 31 Desember n-1/tahun sebelumnya) pada 30 Juni tahun berjalan	Data Tahun Sebelumnya
		2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		100,00				100,00		
			2.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		100,00			100,00		
				a)	Aspek Perencanaan Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja	0-30	30,00	30,00	LHE Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masing-masing perangkat daerah dan/ atau Berita	
				b)	Aspek Pengukuran Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja	0-30	30,00	30,00		

INDIKATOR PENILAIAN					Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1					2	3	4	5	6	7	8
			c)	Aspek Pelaporan Kinerja	15,00	Nilai Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja	0-15	15,00	15,00	Acara Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	2026
			d)	Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	Nilai Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Internal	0-25	25,00	25,00		
		3.	Capaian IKU Perangkat Daerah		100,00				100,00		
		3.1	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah		100,00				100,00		
			a)	Jumlah IKU Perangkat Daerah Tercapai	100,00	A. Predikat Capaian IKU Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) B. Predikat Capaian IKU Tinggi (76% ≤ 90%) C. Predikat Capaian IKU Sedang (66% ≤ 75%) D. Predikat Capaian IKU Rendah (51% ≤ 65%) E. Predikat Capaian IKU Sangat Rendah (≤ 50%)	A/B/C/D/E	A	100,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun sebelumnya	Tahun Sebelumnya
		4.	Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)		100,00	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)			100,00		
		4.1	Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)		100,00				100,00		
			a)	Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	50,00	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK RI	0-100	100,00	100,00	Berita Acara Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan/ Laporan Rekapitulasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang di keluarkan oleh BPK RI	
			b)	Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	50,00	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) APIP	0-100	100,00	100,00	Berita Acara Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan/ Laporan Rekapitulasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat	
		5.	Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah		100,00	Persentase Capaian Realisasi APBD			100,00		
		5.1	Persentasi Realisasi APBD Tahun Sebelumnya		50,00				50,00		
			a)	Realisasi APBD Tahun Sebelumnya		Diisi dengan Persentasi realisasi total APBD dibagi dengan Total APBD masing-masing Perangkat Daerah dikali	0-100	100,00	100,00	Buku Laporan Realisasi Akhir APBD Tahun Sebelumnya	1 tahun terakhir

INDIKATOR PENILAIAN					Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawab an	Nilai	Bukti Dukung	Tahun	
1					2	3	4	5	6	7	8	
						100% pada Tahun Sebelumnya Rumus = $\frac{\text{Realisasi Akhir APBD Tahun}_{(n-1)} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$					Seca ra kese luruh an (2025)	
			5.2	Persentasi Realisasi APBD Tahun Berjalan		50,00			50,00			
				b)	Realisasi APBD Tahun Berjalan		Diisi dengan Persentasi realisasi APBD dibagi dengan Total APBD masing-masing Perangkat Daerah dikali 100% pada Tahun Berjalan Rumus = $\frac{\text{Realisasi APBD Tahun}_{(n)}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	0-100	100,00	100,00	Berita Acara Capaian Kinerja APBD Tahun Berjalan	2026 (Janua ri - bulan berjala n)
		6.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK			100,00			100,00			
			6.1	Tingkat Implementasi ASN BerAKHLAK		100,00			100,00			
				a)	Nilai Hasil Survei internal ASN BerAKHLAK		Diisi dengan Nilai Hasil Survei internal ASN BerAKHLAK	0-100	100,00	100,00	Berita Acara Hasil survei internal ASN BerAKHLAK Tahun Berjalan	2026
		7.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat			100,00			100,00			
			7.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100,00			100,00			
				a)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	60,00	Diisi dengan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perangkat Daerah	0-100	100,00	100,00	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat/screenshoot Aplikasi SKM Terintegrasi Real-Time Tahun Berjalan	
				b)	Hasil Tindak Lanjut SKM Tahun Sebelumnya	40,00	Diisi dengan Persentase tindak lanjut hasil SKM tahun sebelumnya	0-100	100,00	100,00	Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat/screenshoot Aplikasi SKM Terintegrasi Real-Time Tahun Sebelumnya	
		8.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI			100,00			100,00			
			8.1	Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas		100,00			100,00			
				a)	Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja/Perangkat Daerah	100,00	A. Telah memperoleh predikat menuju WBBM B. Telah memperoleh predikat menuju WBK	A/B/C/D/ E/F	A	100,00	Berita Acara Hasil Evaluasi TPI dan/atau Laporan Hasil Evaluasi TPN dan/atau Piagam Penghargaan Capaian Predikat WBK/WBBM pada unit kerja	

INDIKATOR PENILAIAN						Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1						2	3	4	5	6	7	8
							C. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN D. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPI E. Telah dilaksanakan perencanaan ZI Unit Kerja F. Belum dilaksanakan perencanaan ZI					
	B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB				100,00				100,00		
		1.	Indeks Pelayanan Publik			100,00				100,00		
			1.1	Capaian Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		100,00						
				a)	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	100,00	Diisi dengan Nilai Indeks Pelayanan Publik	0-100	100,00	100,00	Hasil Indeks Pelayanan Publik pada aplikasi Penilaian IPP	Tahun berjalan
		2.	Indeks Reformasi Hukum			100,00				100,00		
			2.1	Pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah		36,00				36,00		
				a)	Surat Permohonan pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah		terdapat Surat Permohonan pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Ya/Tidak	Ya	100,00	Surat Permohonan pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	2025
				b)	Naskah Akademik/penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah		terdapat Naskah Akademik/penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Ya/Tidak	Ya	100,00	Naskah Akademik/ penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	2025
				c)	SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah		terdapat SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah	Ya/Tidak	Ya	100,00	SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah	2025
				d)	Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang telah di paraf pejabat terkait		terdapat Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Ya/Tidak	Ya	100,00	Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	2025
			2.2	Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa		24,00				24,00		
				a)	Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa dalam rapat Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah		A. 91-100% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan	A/B/C/D/ E/F	A	100,00	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Pimpinan Tinggi Pratama 3. Notulensi 4. Dokumentasi Foto	2025

INDIKATOR PENILAIAN					Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1					2	3	4	5	6	7	8
						B. 81-90% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan C. 61-80% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan D. 41-60% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan E. 21-40% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan F. dibawah 21% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan					
			2.3	Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya	40,00				40,00		
				a) Evaluasi Produk Hukum		A. Evaluasi Produk Hukum dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran B. Evaluasi Produk Hukum dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran C. Evaluasi Produk Hukum dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran D. Belum pernah dilakukan Evaluasi Produk Hukum	A/B/C/D	A	100,00	1. SK Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Produk Hukum Perda/Perkada 2. Laporan Hasil Evaluasi Produk Hukum Perda/Perkada	2025
				b) Tindaklanjut Hasil Evaluasi Produk Hukum		A. 91-100% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Perda/Perkada B. 81-90% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Perda/Perkada C. 61-80% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam	A/B/C/D/E/F	A	100,00	1. Surat Keputusan/Naskah Dinas Penetapan Propemperda 2. Surat Keputusan/Naskah Dinas Penetapan Propemperkada 3. Surat Keputusan/Naskah Dinas Pengusulan Perubahan/Pencabutan/ Penggabungan Perda/Perkada hasil evaluasi 4. Dokumen Rancangan Perda/Perkada Hasil Evaluasi	SK Yang Ditetapkan Setelah Ditindak Lanjuti Saat Tahun

INDIKATOR PENILAIAN						Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1						2	3	4	5	6	7	8
							program pembentukan Perda/Perkada D. 41-60% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Perda/Perkada E. 21-40% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Perda/Perkada F. kurang dari 21% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Perda/Perkada					Penilaian
		3.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)			100,00				100,00		
			3.1	Surat Keputusan/Surat Perintah Tim Pengelola SP4N Lapor Perangkat Daerah		10,00				10,00		
				a)	Telah membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR Perangkat Daerah yang diformalkan dalam bentuk SK atau SP Kepala Perangkat Daerah			Ya/Tidak	Ya	100,00	SK atau SP Tim Pengelola SP4N - LAPOR yang telah di formalkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Data tahun berjalan
			3.2	Diseminasi SP4N-LAPOR! Kepada Masyarakat		10,00				10,00		
				a)	Telah melakukan diseminasi/sosialisasi SP4N-LAPOR kepada masyarakat/pengguna layanan			Ya/Tidak	Ya	100,00	1. Screenshot media Publikasi SP4N-LAPOR pada website, media sosial; 2. Dokumentasi foto publikasi media luar ruang seperti spanduk, banner, baligo, xbanner, dll	Data tahun berjalan
			3.3	Laporan Pengelolaan SP4N-LAPOR! Setiap Semester		80,00				80,00		
				a)	Jumlah Laporan yang Diterima/Masuk pada SP4N - LAPOR		A. Jumlah Pengaduan diatas 20 aduan B. Jumlah Pengaduan diatas 10 sampai dengan 20 aduan	A/B/C/D	A	100,00	Laporan Rekapitulasi Jumlah pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR/ screenshot Jumlah Pengaduan pada SP4N-LAPOR	Data tahun berjalan

INDIKATOR PENILAIAN						Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1						2	3	4	5	6	7	8
							C. Jumlah Pengaduan diatas 5 sampai dengan 10 aduan D. Jumlah Pengaduan dibawah 5 aduan					
				b)	Persentase Penyelesaian Pengaduan pada SP4N-LAPOR! dengan Status Selesai		A. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI diatas 90% B. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI diatas 70 % s.d 90% C. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI diatas 50% s.d 70% D. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI dibawah 50%	A/B/C/D	A	100,00	Laporan Rekapitulasi Jumlah penyelesaian pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR/ screenshot Jumlah Penyelesaian Pengaduan pada SP4N-LAPOR	Data tahun berjalan
				c)	Laju Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan		A. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaian Pengaduan dibawah 5 hari B. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaian Pengaduan diatas 5 hari s.d 14 hari C. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaian Pengaduan diatas 14 hari	A/B/C	A	100,00	Laporan Rekapitulasi rata-rata lama hari penyelesaian pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR/ screenshot rata-rata lama Penyelesaian Pengaduan pada SP4N-LAPOR	Data tahun berjalan
		4.	Tingkat Digitalisasi Arsip			100,00				100,00		
			4.1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			100,00			100,00		
				a)	Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah		1. Nilai 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) 2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan) 3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik) 4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik)	0-100	100,00	100,00	1. Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Pemerintah Sulawesi Tengah 2. Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) pada masing-masing perangkat daerah yang di keluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	2025

INDIKATOR PENILAIAN						Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1						2	3	4	5	6	7	8
							5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup) 6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang) 7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang)				3. Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Konvensional 4. Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Elektronik (Aplikasi Srikandi) 5. Berita Acara Hasil Evaluasi Kearsipan	
		5.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah			100,00				100,00		
			5.1	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE		100,00				100,00		
				a)	Persentase Paket Pekerjaan yang diumumkan RUPnya melalui SiRUP		Persentase Paket Pekerjaan yang diumumkan RUPnya melalui SiRUP	0-100	100,00	100,00	Screenshot Laporan RUP pada Aplikasi SiRUP atau Laporan Rekapitulasi RUP pada SiRUP yang dikeluarkan oleh Biro PBJ	2026
				b)	Persentase Pencatatan Paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e- Tendering		Persentase Pencatatan Paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e- Tendering	0-100	100,00	100,00	Screenshot Pencatatan Paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e- Tendering atau Laporan Pencatatan Paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e-Tendering yang dikeluarkan oleh Biro PBJ	2025
				c)	Persentase Pencatatan Paket e-Purchasing pada Katalog Elektronik		Persentase Pencatatan Paket e-Purchasing pada Katalog Elektronik	0-100	100,00	100,00	Screenshot Pencatatan Paket e-Purchasing pada Katalog Elektronik atau Laporan Pencatatan Paket e-Purchasing pada Katalog Elektronik yang dikeluarkan oleh Biro PBJ	2025
				d)	Persentase Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE		Persentase Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE	0-100	100,00	100,00	Screenshot Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE atau Laporan Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE yang dikeluarkan oleh Biro PBJ	2025
				e)	Persentase Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE		Persentase Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE	0-100	100,00	100,00	Screenshot Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE atau Laporan Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE yang dikeluarkan oleh Biro PBJ	2025

INDIKATOR PENILAIAN					Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1					2	3	4	5	6	7	8
				f)	Persentase Pencatatan paket transaksional pada Toko Daring	Persentase Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE	0-100	100,00	100,00	Screenshot Pencatatan paket transaksional pada Toko Daring pada SPSE atau Laporan Pencatatan paket transaksional pada Toko Daring pada SPSE	2025
		6.	Indeks Profesionalitas ASN		100,00				100,00		
			6.1	Nilai Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		100,00			100,00		
				a)	Dimensi Kualifikasi	Rata-rata nilai dimensi kualifikasi ASN pada setiap Perangkat Daerah dengan bobot nilai maksimal 25 poin	0-25	25,00	25,00	Laporan Rekapitulasi Indeks Profesional ASN yang telah di Rekapitulasi per Perangkat Daerah oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui data SIASN	2025
				b)	Dimensi Kompetensi	Rata-rata nilai dimensi kompetensi ASN pada setiap Perangkat Daerah dengan bobot nilai maksimal 40 poin	0-40	40,00	40,00		
				c)	Dimensi Kinerja	Rata-rata nilai dimensi kinerja ASN pada setiap Perangkat Daerah dengan bobot nilai maksimal 30 poin	0-30	30,00	30,00		
				d)	Dimensi Disiplin	Rata-rata nilai dimensi disiplin ASN pada setiap Perangkat Daerah dengan bobot nilai maksimal 5 poin	0-5	5,00	5,00		
	C.	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General			100,00				100,00		
		1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General		100,00				100,00		
			1.1	Pemenuhan Dokumen Rencana Aksi RB General		100,00			100,00		
				a)	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat Perangkat Daerah tentang Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Cascading Kinerja	3-14	14	100,00	Cascading Kinerja Sekretariat Perangkat Daerah tentang Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2026
		2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General		100,00				100,00		
			2.1	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General		100,00			100,00		
				a)	Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General	Laporan Capaian Indikator Kinerja Sekretaris Perangkat Daerah tentang Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0-100	100,00	100,00	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2025
II.	RB TEMATIK PERANGKAT DAERAH				100,00				100,00		

INDIKATOR PENILAIAN					Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1					2	3	4	5	6	7	8
	A.	Strategi Membangun RB Tematik			100,00		0-100		100,00		
		1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik			100,00			100,00		
			1.1	Pemenuhan Dokumen Rencana Aksi RB Tematik		100,00			100,00		
				a)	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal dengan memuat logical framework		Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan yang menjadi core Bisnis Perangkat Daerah pada Cascading Kinerja	Ya/Tidak	Ya	100,00	Cascading Kinerja Penyelenggaraan urusan yang menjadi core Bisnis Perangkat Daerah pada Bidang Teknis Perangkat Daerah
		2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik			100,00			100,00		
			2.1	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik		100,00			100,00		
				a)	Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik		Laporan Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan yang menjadi core Bisnis Perangkat Daerah/Raport Kinerja Perangkat Daerah pada Lingkup Penyelenggaraan Urusan yang menjadi core bisnis Perangkat Daerah	0-100	100,00	100,00	Raport Kinerja Perangkat Daerah pada Lingkup Penyelenggaraan Urusan yang menjadi core bisnis Perangkat Daerah pada Bidang Teknis Perangkat Daerah
	B.	Capaian Dampak RB Tematik			100,00				100,00		
		1.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			100,00			100,00		
			1.1	Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN)		100,00			100,00		
				a)	Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap perangkat daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN)		Laporan Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui web Data Inaproc	%	100,00	100,00	Screen Shoot Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui web Data Inaproc
		2.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan			100,00			100,00		
			2.1	Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan		100,00			100,00		
				a)	Tingkat Penerapan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi		Data dan Informasi Implementasi Transformasi digital administrasi pemerintahan yang disampaikan akan disandingkan dengan data dan	Interval Nilai A. 91 - 100	100,00	100,00	Penyampaian 1 buah "Praktek Baik" Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (Digital Services)/ layanan administrasi

INDIKATOR PENILAIAN						Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1						2	3	4	5	6	7	8
							informasi seperti; Reviu/tanggapan publik (google reviu terkait kualitas layanan), data publikasi pada media massa, dan sebagainya serta dari hasil reviu dan pendalaman yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Independen/Tim Penilai Independen dengan parameter sebagai berikut: A. Menyampaikan/melaksanakan Continouous Improvment penerapan Sistem Informasi berbasis elektronik yang telah terintegrasi dalam satu sistem (single sign on) B. Sistem Informasi berbasis elektronik telah mengintegrasikan seluruh/sebagian layanan dalam satu sistem (single sign on) C. Sistem Informasi berbasis elektronik telah berkontribusi terhadap tercapainya kinerja Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah D. Sistem Informasi berbasis elektronik telah memberikan manfaat dan direspon positif oleh pengguna layanan E. Sistem Informasi Berbasis Elektronik telah Berfungsi dengan Baik/dapat dioperasikan/dapat diakses oleh pengguna layanan F. Sistem informasi belum berfungsi/belum dapat digunakan/belum dapat diakses (sistem masih dalam bentuk konsep pengembangan atau prototype)	B. 81 - 90 C. 71 - 80 D. 61 - 70 E. 41 - 60 F. 0 - 40			pemerintah berbasis elektronik dalam bentuk Media Publikasi (booklet, brosur, e-books, pamphlet yang dikemas secara informatif dan menarik)	
		3.	Capaian Kinerja Core Business Organisasi			100,00				100,00		
		3.1	Capaian Kinerja Core Business Organisasi			100,00				100,00		

INDIKATOR PENILAIAN						Bobot Nilai	Penjelasan/Parameter/Instrumen Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Bukti Dukung	Tahun
1						2	3	4	5	6	7	8
				a)	Capaian Kinerja Organisasi dalam Pengentasan Kemiskinan dan/atau Penanganan Stunting dan/atau Peningkatan Investasi dan/atau Pengendalian Laju Inflasi dan/atau kinerja lainnya yang merupakan core business perangkat daerah		Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan disandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya serta dari hasil revidu dan pendalaman yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Independen/Tim Penilai Independen dengan parameter sebagai berikut: A. Capaian Kinerja Program/Kegiatan telah berdampak terhadap capaian kinerja pemerintah daerah B. Capaian kinerja Program/Kegiatan telah berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas (seluruh/sebagian besar target sasaran tercapai) C. Capaian kinerja Program/Kegiatan telah berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat yang menjadi sasaran target program/kegiatan D. Capaian kinerja Program/Kegiatan telah berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh sebagian kecil masyarakat yang menjadi sasaran target program/kegiatan E. Capaian kinerja Program/Kegiatan belum berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	Interval Nilai A. 91 - 100 B. 81 - 90 C. 61 - 80 D. 41 - 60 E. 0 - 40	100,00	100,00	Penyampaian 1 Buah "Praktek Baik" Implementasi RB Tematik (Public Services) dalam bentuk Media Publikasi (booklet, brosur, e-books, pamflet yang dikemas secara informatif dan menarik)	
TOTAL NILAI RB PD						100,00				100,00	(>90-100) AA = ISTIMEWA (>80 - 90) A = SANGAT BAIK (>70 - 80) BB = BAIK (>60 - 70) B = CUKUP BAIK (>50 - 60) CC = CUKUP (>30 - 50) C = BURUK (0 - 30) D = SANGAT BURUK	

VI. Penutup

Untuk Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan Surat Edaran ini, dapat menghubungi Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan narahubung Saudara Mohamad Fajri, ST (08114519323).

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan good governance, kami menghimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui scan QR Code. Surat/dokumen dinyatakan asli jika hasil scan QR Code dapat menunjukkan laman <https://srikandi.arsip.go.id/result> dan <https://qr1.me-qr.com/mobile/pdf>. Kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas pelayanan yang diberikan. Untuk layanan informasi Pemerintah Sulawesi Tengah dapat dijangkau melalui aplikasi Berani Samporoa.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 10 Juli 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, NOVALINA	
---	--	---

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah sebagai laporan;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Deputy Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.